

kan dapat berjalan lancar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang sangat penting bagi setiap OPP dalam upaya menarik simpati dan dukungan masyarakat untuk meraih perolehan suara yang sebesar-besarnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Urgensi kampanye bagi Partai Persatuan Pembangunan, kecuali merupakan arena promosi gagasan dan program perjuangan Partai dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat untuk kurun waktu lima tahun mendatang, juga sekaligus sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi langsung dengan para warga dan massa pendukung Partai.

Oleh karena itu, maka sejak dini Partai Persatuan Pembangunan memandang perlu mengemukakan beberapa konsepsi strategis tentang program perjuangan Partai untuk ditampilkan dalam Kampanye Pemilu 1992 yang akan datang. Sudah barang pasti, program perjuangan yang menjadi tema dan materi kampanye adalah program perjuangan Partai yang berhubungan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Program perjuangan sebagaimana dimaksud merupakan hasil keputusan Muk-tamar II Partai Persatuan Pembangunan tahun 1989 yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang cenderung semakin maju, kritis dan kualitatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang "Program Perjuangan PPP dalam Kampanye Pemilu 1992" secara sederhana, yang dalam pemaparannya akan diawali dengan uraian mengenai apa dan siapa Partai Persatuan Pembangunan, proyeksi masalah yang dihadapi bangsa di masa depan, terakhir Program yang hendak

ditawarkan dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

II

Untuk dapat memahami Partai Persatuan Pembangunan diperlukan pendekatan dan pemahaman, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Pancasila sebagai asas perjuangan. Pancasila sebagai satu-satunya asas ditetapkan oleh Muk-tamar I bulan Agustus 1984, sebelum lahirnya Undang-undang yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan demikian, penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukanlah karena adanya Undang-undang, tetapi, berdasarkan atas kesadaran dari tokoh-tokoh dan warga Partai Persatuan Pembangunan terhadap Pancasila. Kesadaran yang demikian itu sangat penting, terutama dalam proses pelem-bagaan dan pelaksanaan Pancasila secara lebih kongkret di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensinya.

Partai Persatuan Pembangunan selanjutnya berkeinginan untuk mewujudkan Pancasila secara nyata dan terasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan Pembangunan Nasional benar-benar sebagai pengamalan Pancasila.

Dengan pandangan tersebut, Partai Persatuan Pembangunan senantiasa dan akan terus berusaha menggunakan parameter ideologis untuk menilai dan menguji, apakah seluruh aktivitas pembangunan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan parameter ideologi Pancasila.

Partai Persatuan Pembangunan karena-nya akan berusaha untuk mencegah dilak-

sanakannya program dan kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan parameter ideologis tersebut, yakni nilai-nilai Pancasila.

Di samping itu, Partai Persatuan Pembangunan ingin tetap dengan gigih mempertahankan dan membela kemurnian Pancasila dan akan berusaha dengan sekuat tenaga menghadapi siapa pun yang mencoba mengebiri, memanipulasi serta menyalahgunakan Pancasila sebagai alat untuk kepentingan subyektif golongannya.

Kedua, Tujuan Partai Persatuan Pembangunan. Sesuai dengan UU No. 3 tahun 1975 Jo. UU No. 3 tahun 1985, serta ketentuan yang termuat dalam AD-ART, Partai Persatuan Pembangunan bertujuan untuk:

- (1) Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila.

Ketiga, Fungsi Partai Persatuan Pembangunan. Sebagai kekuatan sosial politik, Partai Persatuan Pembangunan berfungsi untuk:

- (1) Menyalurkan aspirasi rakyat secara sehat;
- (2) Mewujudkan hak-hak politik rakyat;
- (3) Membina anggota-anggotanya menjadi warganegara Republik Indonesia yang bermoral Pancasila dan setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

(4) Mendidik kesadaran politik rakyat.

Keempat, Usaha Partai Persatuan Pembangunan. Untuk mencapai tujuan Partai Persatuan Pembangunan, dilakukan berbagai usaha, antara lain:

- (1) Membangun manusia Indonesia seluruhnya dan seluruh masyarakat Indonesia menuju terwujudnya manusia Pancasila yang beriman, bertaqwa, taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta sejahtera lahir dan batin;
- (2) Meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya selaku warga-negara dari negara hukum yang merdeka, berdaulat, bersatu dan demokratis;
- (3) Menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan nasional, serta mengusahakan adanya keseimbangan antara pembangunan spiritual dan material;
- (4) Memperjuangkan terbentuknya perundang-undangan nasional yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (5) Mewujudkan terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, sehingga mampu menunjang pembangunan di segala bidang;
- (6) Mendorong agar perekonomian nasional disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga tercapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata;
- (7) Memberantas paham komunisme/marxisme/leninisme dan paham-paham lain yang bertentangan dengan Panca-

sila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kelima, Prinsip Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Untuk meraih tercapainya tujuan Partai Persatuan Pembangunan dan dalam upaya mengembangkan berbagai usaha dan kegiatan pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip perjuangan, sebagai berikut:

- (1) Prinsip Ibadah. Dengan prinsip ini diharapkan tampil dan berkembang pejuang-pejuang Partai yang ikhlas berkorban, memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki moralitas dan akhlak yang mulia, bersih, jujur, tidak materialistik, menghindari diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan moral agama;
- (2) Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan. Prinsip ini sangat diperlukan bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran, segala aturan akan dapat terlaksana dan berjalan baik, serta akan menimbulkan keharmonisan, keserasian, ketenteraman dan sekaligus akan menghilangkan keresahan dan konflik;
- (3) Prinsip Musyawarah. Suatu prinsip yang sangat penting, tidak hanya dalam setiap pengambilan keputusan, tetapi juga dalam memelihara saling pengertian, yang akan menjamin kemantapan pelaksanaan sesuatu tugas. Dengan prinsip ini juga dikembangkan sikap saling menghargai pendapat satu dengan lainnya, sehingga keputusan yang diambil mendorong timbulnya rasa penuh tanggung jawab.
- (4) Prinsip Persamaan dan Kebersamaan. Dengan prinsip ini, suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa

akan tetap terpelihara; dan tampilnya keangkuhan golongan, perlakuan diskriminatif, saling curiga dapat dicegah;

- (5) Prinsip Konsistensi. Dengan prinsip ini, tetap terpelihara kesetiaan, loyalitas, kontinuitas, dan keterkaitan seluruh warga Partai Persatuan Pembangunan terhadap cita-cita perjuangan. Dengan prinsip ini pula, pengabdian yang berkelanjutan, berwawasan ke depan, serta upaya kemantapan pengabdian yang terus menerus bagi kemajuan Partai, bangsa dan negara dapat berkembang;
- (6) Prinsip Berbuat Kebajikan. Dengan prinsip ini, dikembangkan dasar pemikiran untuk mewujudkan perbuatan yang baik, berfaedah, serta mencegah segala perbuatan yang tercela. Prinsip ini juga menjadi landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi dan peran Partai dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta melaksanakan kontrol sosial.

III

Proyeksi masalah dan tantangan bangsa di masa depan berkisar pada bidang-bidang yang meliputi:

- (1) *Bidang ideologi*. Sebagai salah satu dari lima bidang yang menjadi perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, dewasa ini masih tetap menjadi perhatian kita bersama, adalah bidang ideologi, meskipun secara formal telah selesai penataannya melalui penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, pada masa-masa mendatang yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi, akan

menghadapi tiga masalah mendasar, sebagai berikut:

Pertama, masalah kontinuitas. Sebagai ideologi, Pancasila akan diuji oleh perjalanan sejarah, apakah akan tetap *survive*, berkesinambungan dan mampu memenuhi tuntutan-tuntutan masa depan atau sebaliknya. Untuk kelanggengan Pancasila, maka menjadi kewajiban bagi setiap warganegara untuk mempertahankan, menghayati dan mengamalkannya.

Kedua, masalah institusionalisasi. Pelembagaan Pancasila sebagai ideologi terjadi dalam jalinan resiprokal (bersifat saling berbalasan) di antara proses pendalaman ideologi dan proses pemantapan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Jika kedua proses tersebut tidak selaras, maka upaya institusionalisasi ideologi Pancasila tidak akan dapat terwujud.

Ketiga, masalah akulturalisasi. Di tengah-tengah keragaman ideologi dunia dan pengaruh globalisasi di masa depan, Pancasila haruslah lebih mampu tumbuh semakin jelas dan kokoh di bumi Indonesia.

(2) *Bidang politik*. Dengan selesainya penataan di bidang ideologi, yang ditandai dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh semua organisasi politik dan kemasyarakatan, belum berarti penataan di bidang politik serta-merta selesai. Proses pembangunan politik di Indonesia akan tetap menghadapi masalah dan tantangan, terutama yang paling menonjol adalah:

Pertama, masalah operasionalisasi Sistem Politik Demokrasi Pancasila. Sistem Politik Demokrasi Pancasila pada era pasca 'asas tunggal', seharusnya lebih bersifat mendidik, peka terhadap masalah masyarakat dan mampu mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Persoalannya adalah ba-

gaimana mengembangkan sistem politik yang demikian, sehingga memungkinkan tersalurnya tuntutan-tuntutan mobilitas vertikal dan horizontal.

Kedua, masalah pengembangan solidaritas sosial. Akibat surutnya beban ideologis dalam tataran politik formal pasca 'asas tunggal', maka bukan mustahil muncul masalah "interest" dalam pengertian sosiologis maupun sosial-ekonomi di masa mendatang. Fenomena tersebut telah nampak saat ini, dengan adanya kesenjangan sosial, baik antar-golongan maupun antar-daerah, yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketiga, masalah pengembangan kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat dalam arti ideologis dan politis semakin diperlukan dalam upaya menangkal usaha-usaha infiltrasi ideologi asing, munculnya konflik-konflik dan kerawanan ideologis bukan tidak mungkin akan terjadi di masa mendatang, apabila pengaruh global tidak mampu diantisipasi dan ditangkal secara tepat.

(3) *Bidang ekonomi*. Kesenjangan antara golongan yang kaya dan yang miskin makin tampak, akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang cenderung mengarah pada korporatisme, yakni interaksi antara pejabat tinggi birokrasi dengan sejumlah kecil Kelompok Kepentingan yang kuat dan biasanya diwakili oleh kelompok bisnis, yang menghasilkan suatu kebijakan pemerintah. Dalam sistem politik dan pemerintahan yang korporatis ini, hanya menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, masalah yang paling mendesak untuk saat ini dan mendatang adalah:

Pertama, pelaksanaan Demokrasi Ekonomi. Sesungguhnya, demokrasi ekonomi dapat dikatakan ada dalam suatu negara secara mantap, jika sebagian terbesar rak-

yat di negara yang bersangkutan berpeluang besar untuk beratapencarian atau untuk mencari nafkah yang dapat memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai tingkat yang wajar, termasuk kebutuhan untuk berusaha meraih kemajuan yang dikehendaki.

Kedua, masalah distribusi pendapatan. Apabila sistem yang diperlakukan cenderung korporatis, maka distribusi pendapatan masyarakat tidak akan pernah merata. Apalagi apabila sistem ekonomi hanya menggunakan mekanisme harga pasar, persaingan sempurna, persaingan murni dan cenderung monopolistik, maka tidak akan menjamin tingkat pendapatan rakyat secara wajar. UUD 1945 menghendaki agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(4) *Bidang sosial-budaya.* Sebagai tantangan masa depan yang tampak pada fenomena sekaligus masalah-masalah baru, akibat keberhasilan pembangunan, maka yang harus mendapat perhatian, antara lain adalah:

Pertama, masalah sumberdaya manusia, yang ditandai dengan hadirnya golongan menengah di tengah-tengah masyarakat, yang saat ini memainkan peran penting dan menentukan dalam lingkup kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.

Kedua, masalah demokratisasi pendidikan. Pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan masih belum dirasakan terlampau jauh, bahkan pendidikan semakin mahal bagi sebagian terbesar masyarakat.

Ketiga, masalah kesadaran dan penegakan hukum. Tuntutan keadilan, termasuk keadilan di bidang hukum semakin hari semakin menggema, seiring dengan pesatnya derap pembangunan. Hal ini menun-

jukkan bahwa ketimpangan sosial masih terus berlanjut, akibat kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum secara efektif.

(5) *Bidang kehidupan beragama.* Jika diukur dari ritual-ritual yang tampak sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya, perkembangan kehidupan beragama telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Semua agama yang hidup di Indonesia menunjukkan gejala kebangkitan, tetapi ironisnya, bersamaan dengan itu, penyalahgunaan wewenang, korupsi, semangat egoisme, materialisme tetap menggebu-gebu, seakan-akan tidak tersentuh oleh kehidupan beragama yang sedang bangkit.

(6) *Bidang Hankam.* Stabilitas nasional yang mantap dan dinamis telah memberikan andil amat besar dalam mengawal sukses pembangunan Orde Baru dalam pembangunan jangka panjang tahap pertama. Stabilitas ini harus tetap terpelihara, tanpa mengganggu proses demokratisasi dan tumbuhnya prakarsa serta kreativitas masyarakat yang sedang berlangsung.

Kecuali itu, gencarnya arus globalisasi informasi dan ekonomi, semakin canggihnya sains dan teknologi, dan berakhirnya perang dingin, merupakan fenomena-fenomena yang mesti harus diantisipasi, sehingga masyarakat, terutama ABRI sebagai kekuatan inti pertahanan-keamanan negara dapat lebih siaga menghadapinya.

IV

Sebagaimana telah dipaparkan di muka, bahwa Muktamar II Partai Persatuan Pembangunan tahun 1989 yang lalu telah menghasilkan beberapa keputusan, antara lain, Program Perjuangan Partai Persatuan

Pembangunan Periode 1989-1994. Keputusan Muktamar tersebut merupakan konseptualisasi dari perjuangan Partai Persatuan Pembangunan yang bersifat integral, untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

Program Perjuangan sebagai kristalisasi usaha Partai yang harus dilaksanakan, sesuai dengan tuntutan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, diperlukan program yang rasional, berkualitas, dan sistematis, sejalan dengan tuntutan GBHN, yang mengisyaratkan agar semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lebih berorientasi pada program pembangunan.

Dalam kaitan itu, seharusnya tidak akan ada lagi organisasi kekuatan sosial politik yang dalam mengusahakan perolehan simpati dan kepercayaan rakyat, selalu hanya membangkitkan hubungan emosional serta jaringan-jaringan primordialisme, apalagi mengandalkan kharisma tokoh legendaris ataupun topangan birokrasi, melainkan harus bertumpu pada program masing-masing yang "marketable" dan dapat ditawarkan kepada masyarakat, sehingga Muktamar II Partai Persatuan Pembangunan memutuskan menetapkan perlunya program yang lebih aspiratif, akomodatif dan komprehensif dalam kehidupan masyarakat.

Selain bersungguh-sungguh dalam membangun, Partai Persatuan Pembangunan juga menata kehidupan Partai secara modern melalui pengembangan budaya konstitusional dalam tatanan kehidupan politik nasional, serta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, program Partai Persatuan Pembangunan berjalan selaras dengan derasnya arus modernisasi Indonesia.

Untuk merumuskan program-program yang hendak dijadikan materi kampanye, Partai Persatuan Pembangunan bertitik tolak dari tema sentral Partai pada Pemilu

1992 dan Sidang Umum MPR 1993, yaitu "Peningkatan Kualitas Pembangunan yang Berwawasan Kebenaran, Keadilan Sosial dan Demokrasi, dalam rangka menyongsong era Kebangkitan Nasional Kedua."

Kecuali itu, juga didasarkan pada arah perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, yakni terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kita harapkan mendapatkan keridhaan Allah Yang Maha Kuasa.

Adapun sasaran perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, sebagai berikut:

- (1) Mantapnya Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai Politik yang sehat, bersatu, mandiri, berkualitas dan berkemampuan menjalankan fungsinya dalam kehidupan politik nasional;
- (2) Meningkatnya peranan Partai Persatuan Pembangunan sebagai kekuatan sosial politik dalam Pembangunan Nasional dan dalam mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila;
- (3) Kukuhnya keutuhan dan kekompakan Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka menunjang Ketahanan Nasional yang disemangati oleh Wawasan Nusantara;
- (4) Meningkatnya citra Partai Persatuan Pembangunan dalam mengemban amanat penderitaan rakyat dan menyalurkan aspirasi rakyat;
- (5) Tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (6) Suksesnya Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju terwujudnya masyarakat adil dan

makmur yang diridloi Allah Yang Maha Kuasa;

- (7) Keberhasilan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Umum 1992;
- (8) Keberhasilan Partai Persatuan Pembangunan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, program-program yang ditawarkan dalam kampanye nanti adalah meliputi bidang-bidang kehidupan, sebagai berikut:

Pertama, bidang kehidupan beragama. Partai Persatuan Pembangunan berupaya agar pendidikan agama merupakan bagian integral dan penting dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dan perjuangan itu telah berhasil dimuat dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Partai Persatuan Pembangunan mendorong terlaksananya proses sosialisasi dan internalisasi ajaran agama sejak dini dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi muda, sebagai sumberdaya insani pembangunan dan generasi penerus perjuangan bangsa.

Kecuali itu, Partai Persatuan Pembangunan juga mendorong berkembangnya proses kontekstualisasi pemahaman ajaran agama secara komprehensif, yang pada gilirannya mampu mewujudkan iklim kehidupan beragama yang kondusif bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, bidang Ideologi. Untuk menjawab tiga masalah mendasar di bidang ideologi, Partai Persatuan Pembangunan berupaya meningkatkan usaha pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, baik di lingkungan anggota Partai, maupun anggota masyarakat pada umumnya, sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki. Kemu-

dian, secara sungguh-sungguh menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas Partai Persatuan Pembangunan, yang menjiwai kehidupan Partai dan diaktualisasikan dalam kebijakan dan pelaksanaan program-program Partai.

Dalam hubungan ini, Partai Persatuan Pembangunan akan terus mengembangkan pemikiran-pemikiran ke arah terwujudnya proses transformasi pembangunan ideologi dari fase struktural-institusional memasuki fase kultural. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan memiliki ketahanan ideologis yang handal dan Pancasila sebagai ideologi nasional akan tetap kokoh dan mampu menjawab tuntutan zaman.

Ketiga, bidang Politik. Dalam menghadapi kecenderungan politik masa depan yang bertumpu pada masalah-masalah sosial-budaya, Partai Persatuan Pembangunan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kemandirian dan kualitas Partai, baik kualitas sumberdaya manusianya, kualitas lingkungannya, kualitas kelembagaannya, maupun kualitas fungsi dan perannya, melalui peningkatan dan pengembangan upaya-upaya konsolidasi, kaderisasi dan partisipasi.

Untuk itu, proses kaderisasi dan sosialisasi politik terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab politik masyarakat, untuk lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan Sistem Politik Demokrasi Pancasila yang pada gilirannya mampu memberikan akses bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Kecuali itu, Partai Persatuan Pembangunan akan terus berupaya untuk mengikuti dan mengenali pola perubahan masyarakat yang terjadi dari waktu ke waktu, serta mengembangkan pemikiran-pemikiran ke arah peningkatan kualitas pem-

bangunan politik di Indonesia pada masa yang akan datang, melalui peningkatan kualitas kepemimpinan dan lain-lainnya.

Dalam kaitan ini, Partai Persatuan Pembangunan telah memperjuangkan secara gigih dipulihkannya hak-hak politik rakyat, termasuk hak Pegawai Negeri untuk menentukan pilihan politik sesuai dengan aspirasinya; mantapnya kehidupan politik yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum; terlaksananya Pemilu dengan asas Luber dan diselenggarakan secara jujur dan adil; terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, melalui peningkatan pengawasan sosial dan peranan DPR; meningkatnya kegiatan pendidikan politik rakyat dan partisipasi rakyat dalam pembangunan; serta berkembangnya kehidupan demokrasi Pancasila, sesuai dengan asas Pancasila dan UUD 1945.

Keempat, bidang Ekonomi. Partai Persatuan Pembangunan mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat; meningkatnya kemampuan golongan ekonomi lemah; semakin terbukanya kesempatan berusaha dan kesempatan memperoleh lapangan kerja; serta terus mendorong tumbuhnya etos kerja yang kondusif bagi peningkatan produktivitas nasional untuk lebih meningkatkan pemerataan. Meskipun wakil-wakil Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Badan Pekerja MPR tahun 1977/1978 telah memperjuangkan diutamakan pemerataan, tetapi hanya menghasilkan rumusan yang tidak menjamin terlaksananya pemerataan tersebut, dari waktu ke waktu.

Kecuali itu, Partai Persatuan Pembangunan juga mendorong berkembangnya pemikiran-pemikiran ke arah terwujudnya peranan pemerintah yang bersikap *tut wuri handayani* dalam perekonomian bangsa dan negara Indonesia, dan mendorong terus

menerus tumbuhnya Koperasi dan sektor swasta yang lemah secara proporsional dalam perekonomian bangsa.

Kelima, bidang Sosial-budaya. Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi masalah-masalah sosial-budaya, berusaha mendorong terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, melalui program kaderisasi yang sistematis, terarah dan berkesinambungan di lingkungan Partai; terciptanya iklim yang kondusif bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi; terjangkau biaya dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil; dan terciptanya peraturan perundangan yang telah memungkinkan proses demokratisasi pendidikan berlangsung.

Kecuali itu, Partai Persatuan Pembangunan juga mendorong meningkatnya kesadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan; makin tegaknya hukum dan keadilan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan; serta berkembangnya pemikiran-pemikiran ke arah pertumbuhan golongan menengah yang semakin membesar dalam strata sosial-ekonomi di Indonesia.

Keenam, bidang Hankam. Partai Persatuan Pembangunan sebagai kekuatan sosial politik mendorong terlaksananya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata) dalam mempertahankan dan memelihara Negara Republik Indonesia. Di samping itu, peranan Dwi-fungsi ABRI harus lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan kehidupan politik yang sehat, di bidang kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, dan melihat segala golongan dalam masyarakat sebagai saudara-saudara sebangsa yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Partai Persatuan Pembangunan berkeya-

kinan, bahwa ABRI dalam sistem ketentaraan Indonesia adalah tentara kebangsaan yang berwatak kerakyatan. Oleh karena itu, ABRI diharapkan tetap manunggal dengan rakyat karena kekuatan ABRI sesungguhnya terletak pada kemanunggalan tersebut; melindungi rakyat dari segala gangguan, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri; serta berada di atas semua golongan dan tidak berpihak pada golongan manapun, kecuali pada kepentingan rakyat.

Untuk menghadapi dampak negatif globalisasi, maka Partai Persatuan Pembangunan mendorong terwujudnya ABRI yang kokoh dan berkemampuan menghadapi berbagai tantangan yang disebabkan oleh perkembangan sains dan teknologi persenjataan mutakhir. Kecuali itu, Partai Persatuan Pembangunan juga mendorong dimasyarakatkan dan digalakkannya pelaksanaan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, dan Rakyat Terlatih sebagai upaya persiapan pelaksanaan sepenuhnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Dalam hubungan ini, Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada ABRI atas prestasi yang telah ditunjukkan selama ini, dalam melaksanakan fungsinya sebagai stabilisator, dinamisator dan modernisator kehidupan bangsa.

Dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 1992, ABRI diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas perannya dan bersikap *equidistant*, yakni menempatkan diri pada jarak yang sama di antara semua organisasi

kekuatan sosial politik yang menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP) pada tahun 1992.

Partai Persatuan Pembangunan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai wadah artikulasi kepentingan rakyat merasa banyak menghadapi kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Rekayasa politik yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru terhadap organisasi kekuatan sosial politik, menunjukkan hasil yang tidak selalu menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin megunatnya kekuatan supra-struktur politik yang cenderung dominan dalam kehidupan kemasyarakatan. Sementara kekuatan infra-struktur, terutama Partai Politik mengalami proses marjinalisasi. Itulah yang menjadi kendala struktural Partai saat ini.

Kemudian, kendala kultural yang dihadapi Partai Persatuan Pembangunan adalah masih berkembangnya budaya politik yang tidak kondusif bagi pengembangan iklim politik yang demokratis, emansipatif dan partisipatif.

Oleh sebab itu Pemilu 1992 diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan, hingga terciptanya pelaksanaan sistem politik yang memberikan lebih banyak peluang bagi fungsi dan peranan kekuatan infra-struktur politik yang wajar dan proporsional. Kecuali itu, iklim politik yang akan datang diharapkan dapat berkembang secara lebih demokratis dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan, menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.